

BAURAN KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DAN DAMPAKNYA BAGI ANGGARAN PERTAHANAN

MONETARY AND FISCAL POLICY MIXED-SCANNING IMPACT ON THE DEFENSE BUDGET

Arijo Hadi¹, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari², dan Suparman Djapri³

Universitas Pertahanan Indonesia

(joe_fukaya@yahoo.com, arwin.sumari@yahoo.com, suparmandjapri@yahoo.com)

Abstrak - Tulisan ini hendak mengulas fenomena yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara kebutuhan yakni permintaan sekaligus ekspektasi akan pembangunan kekuatan sektor pertahanan yang memerlukan peningkatan anggaran dengan kondisi kemampuan sumber daya/anggaran yang terbatas. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi menjadi prasyarat utama dan pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan makro ekonomi yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi. Penelitian ini membahas kebijakan fiskal-moneter sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran sektor pertahanan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif *purposive sampling* dengan metode *Means-Ways-Ends* dan kurva IS-LM sebagai alat analisis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bauran kebijakan fiskal-moneter yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi makro ekonomi yang sedang dihadapi sebagai dasar penentuan kombinasi kebijakan fiskal-moneter yang tepat guna mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi. Bauran kebijakan tersebut harus disertai syarat adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Kata Kunci: anggaran sektor pertahanan, bauran kebijakan Fiskal-Moneter, Produk Domestik Bruto (PDB)

Abstract - This study stems from the gap between the government's needs and expectations for the development of defense power and the increase of defense budget with the limited condition of resource capacity/budget. To accommodate these needs, the relatively high GDP growth becomes the main prerequisite and the government needs to appropriately formulate strategy on macroeconomic policies that can create more optimal growth in Gross Domestic Product (GDP). This study will discuss fiscal and monetary mix policy as policy instrument which is considered to be the driver of economic growth and also discuss how this strategy impacts on the budget of the defense

¹ Alumni Program Studi Ekonomi Pertahanan Cohort-5, Universitas Pertahanan. Alumnus S1IESP, Ekonomi Moneter, Universitas Airlangga (Unair), Alumnus S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Konsultan ahli pada Kedeputusan I, bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, BNPT.

² Kolonel Lek., Dr., S.T., M.T., Analis Kebijakan Rencana Kontinjensi Ekonomi, Kedeputusan Politik dan Strategi, Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia; Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Sentul, Bogor – 16710; Peneliti Senior di *Cognitive Artificial Intelligence Research Group* (CAIRG), Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, Bandung – 40115.

³ Marsekal Muda, M.M., M.Si (Han), mantan Wakil Rektor III Universitas Pertahanan Indonesia.

sector. This study used a qualitative descriptive approach with Means-Ways-Ends analysis and IS-LM curve as the tools of analysis. From the result of this study, it is concluded that the fiscal-monetary policy mix which is most appropriate is firstly to consider the circumstances that macro economy is facing. It is then used as the basis of decision making to determine that most appropriate combination of fiscal and monetary policy for achieving high GDP growth. Furthermore, the policy mix must be completed with synergy and coordination between fiscal and monetary policy formulation. Fiscal-monetary mix policy strategy which is appropriate will positively influence on the achievement of a relatively optimal GDP growth and the growth of potential fiscal space/budget will also occur. It is, of course, will also have a positive impact on the potential growth of the defense budget.

Keywords: defense sector budget, Domestic Product (GDP) Growth, fiscal-monetary policy mix

Pendahuluan

Dinamika lingkungan strategis, khususnya regional maupun internasional menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan anggaran sektor pertahanan di setiap negara, baik di tingkat kawasan maupun global. Fenomena yang terjadi adalah pada satu sisi, setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju, pada hakikatnya memiliki kebutuhan untuk membangun kekuatan pertahanannya dari tahun ke tahun dikarenakan adanya dinamika lingkungan strategis yang dihadapi oleh masing-masing negara. Secara umum, perencanaan kebutuhan pada pembangunan kekuatan pertahanan satu negara dapat didasarkan atas pertimbangan ancaman yang dihadapi (*threat based planning*) atau pada kemampuan yang ingin dibangun (*capability based planning*).⁴ Dalam konteks Indonesia, pembangunan kekuatan pertahanan masih didasarkan pada *threat based planning* mengingat kondisi keterbatasan keuangan negara.⁵

Dinamika lingkungan strategis tidak hanya berimplikasi pada perubahan paradigma ancaman yang dihadapi, tetapi juga kebutuhan akan kemampuan pertahanan yang perlu dibangun oleh satu negara. Di sisi lain, rencana pembangunan kekuatan pertahanan juga tidak dapat lepas dari pengaruh kemampuan dan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Seberapa besar kemampuan ekonomi yang dimiliki negara akan berdampak pada kemampuan negara tersebut dalam membangun kekuatan pertahanannya. Untuk itu, yang diperlukan oleh negara adalah adanya pembangunan

⁴ Yani Antariksa, *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Forces (MEF)*, dalam <http://www.artileri.org/>, 3 Desember 2013, diunduh pada 26 November 2015.

⁵ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.723-730.

ekonomi yang memadai dan mampu menjadi penopang bagi pembangunan sektor pertahanan.⁶ Kondisi besaran belanja militer/anggaran sektor pertahanan dunia berdasarkan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Hingga tahun 2014, rasio belanja militer (*military expenditure/military budget*) Indonesia masih berkisar antara 0,89%-0,90% dari total nilai PDB.⁷

Hal yang menjadi harapan, pada masa kini dan mendatang, Indonesia mampu membangun kekuatan pertahanannya hingga tercapainya *Minimum Essential Force* (MEF) pada 2024 dengan rasio nilai anggaran sektor pertahanan sekitar 1,5% dari PDB Indonesia. MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif. Ini dalam rangka menghadapi ancaman aktual untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rencana pembangunan mulai tahun 2014 dan seterusnya, terlihat adanya indikasi upaya pemerintah Indonesia untuk merealisasikan percepatan pencapaian target MEF 2024.⁹ Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa anggaran dalam jumlah yang besartelah disalurkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu, Kemhansendiri menyatakan optimismenya akan keberhasilan pencapaian target MEF 2024 pada tahun 2019.¹⁰

Di sisi lain, anggaran pertahanan mulai dari tahun fiskal 2012 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya secara signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan anggaran pertahanan dapat dikatakan semu karena belum merefleksikan adanya kenaikan/pertumbuhan rasio porsi anggaran pertahanan terhadap total PDB secara signifikan. Artinya bahwa proporsi pertumbuhan anggaran pertahanan

⁶ *Ibid.*

⁷ Purnomo Yusciantoro, *op.cit*, hlm. 730.

⁸ Yani Antariksa, *op.cit*.

⁹ Bappenas, "Evaluasi/Tinjauan Bappenas terhadap RPJMN 2015-2019 Bab 9 Pertahanan dan Keamanan" dalam http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9549, diunduh pada 26 November 2015.

¹⁰ Kemhan, "Kemhan optimis MEF tercapai pada 2019" dalam <http://www.indonesia.go.id/12117-kemhan-optimis-mef-tercapai-pada-2019>, diunduh pada 26 November 2015.

secara rasio terhadap PDB tidak berubah banyak apabila dibandingkan dengan nilai total PDB yang juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.¹¹

Dari dua kondisi yang berbeda tersebut, ditemukan fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di satu sisi, PDB Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan secara normal dalam kisaran 5%-5,5%, sementara rasio anggaran sektor pertahanan masih berada dalam kisaran 0,85%-0,90% dari PDB sehingga diperlukan adanya upaya akselerasi (percepatan) yang mengakomodasi pertumbuhan anggaran sektor pertahanan sehingga dapat mengejar target rasio 1,5 % dari PDB.¹²

Faktor keterbatasan anggaran dan faktor kebijakan distribusi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan harus mengakomodasi pembangunan di sektor-sektor selain sektor pertahanan. Untuk itu, agar pemerintah dapat mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran maka pemerintah harus mampu memperbesar kapasitas ruang fiskal/APBN. Upaya untuk memperbesar ruang fiskal tersebut hanya dapat dimungkinkan apabila pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi/PDB yang tinggi, bukan sebaliknya dengan cara lain dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan yang dapat menimbulkan resiko di kemudian hari, misalnya melalui pinjaman hutang.

Rumusan Masalah

Pada satu sisi, pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Pertahanan memiliki kebutuhan dan ekspektasi adanya peningkatan anggaran sektor pertahanan yang signifikan, namun di sisi lain, diperoleh fakta bahwa pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan anggaran dan anggaran yang dimiliki tersebut juga harus memperhatikan untuk kebutuhan pembangunan di luar sektor pertahanan (*nonguns*).

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter yang tepat sebagai Pendorong Pertumbuhan PDB dan pengaruhnya terhadap

¹¹ Kemhan RI, 2012, "Presiden akan meningkatkan anggaran pertahanan 20%", dalam <http://www/indonesia.go.id>, diunduh pada 26 Nobeber 2015.

¹² Bank Indonesia (BI), *Bank Indonesia dalam "Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)"*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015).

besaran anggaran sektor pertahanan? Pertanyaan-pertanyaan pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kombinasi bauran kebijakan makro ekonomi fiskal dan moneter seperti apayang tepat dan dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan APBN dan besaran anggaran sektor pertahanan?
2. Dengan adanya kenaikan/pertumbuhan PDB secara bertahap tiap tahunnya dan rencana percepatan pencapaian target MEF 2024, bagaimana proporsi (rasio) ideal pertumbuhan anggaran pertahanan tiap tahunnya?

Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa adanya pengaruh, keterkaitan dan kontribusi aspek makroekonomi dimana kebijakan fiskal sebagai salah satu kebijakan makroekonomi memiliki dampak terhadap sisi pengeluaran pemerintah pada pasar barang dan jasa (IS), walaupun tidak secara serta merta berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan moneter secara mandiri juga mempengaruhi perekonomian nasional dari sisi suplai uang atau *Supply of Money (M)*, yang biasa dikenal sebagai JUB dan permintaan akan uang/*Liquidity Demand (L)* pada pasar uang dan pasar modal. Penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti bauran kebijakan di antara keduanya yakni kebijakan fiskal dan moneter yang paling tepat dan berdampak pada peningkatan *output* nasional atau pertumbuhan PDB. Penelitian ini melihat bagaimana rumusan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat berdampak pada potensi adanya pertumbuhan besaran nilai APBN/ ruang fiskal dan besaran nilai anggaran sektor pertahanan.

Metodologi dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif. Adapun metode analisis adalah analisis dalam pengambilan keputusan yakni *Means-Ways-Ends* dan alat analisis yang digunakan adalah kurva IS-LM. Sumber data dalam penelitian ini, ada dua macam, yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan bersumber dari hasil/jawaban atas pertanyaan tertulis, diskusi maupun wawancara langsung terhadap beberapa narasumber/ informan kunci. Para informan

terpilih diantaranya dari kalangan pakar ekonomi/ekonom, mantan birokrat dan juga beberapa ahli dalam bidang ekonomi pertahanan. Metode pemilihan informan/narasumber adalah bersifat *purposive sampling*, dimana para informan adalah narasumber yang memiliki profesi, kompetensi, dan keahlian terkait kebijakan makroekonomi, kebijakan fiskal maupun moneter di Indonesia dan juga memahami aspek ekonomi pertahanan. Data sekunder, bersumber dari data-data berupa laporan/publikasi umum, table ataupun angka-angka statistik yang bersumber dari publikasi resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia (BI), ataupun nota keuangan Kementerian Keuangan.

Analisis data pertama kali dilakukan terhadap data primer, yakni hasil dari angket pertanyaan tertulis dan wawancara terhadap para narasumber yang memahami betul perihal kebijakan makro ekonomi, kebijakan fiskal maupun moneter dan aspek ekonomi pertahanan. Jawaban-jawaban yang diperoleh dari angket tersebut kemudian dikumpulkan, direduksi dan disarikan melalui *coding axial* dan ditampilkan bentuk tabulasi tabel narasumber. Selanjutnya dilakukan analisis data sekunder melalui studi mandiri, telaah dan kajian data sekunder yang berupa laporan tahunan dari BKF, BI dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data ini berguna sebagai penjelasan lebih lanjut tentang pengaruh/dampak dari Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap pertumbuhan PDB Indonesia dan potensi pertumbuhan anggaran sektor pertahanan. Dari studi data sekunder ini, dicari hal-hal yang menjelaskan keterkaitan atau hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB dan dampaknya terhadap pertumbuhan anggaran sektor pertahanan.

Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan, khususnya data primer, baik yang berupa keterangan tertulis maupun hasil diskusi terbatas dengan beberapa informan/narasumber, diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan makro ekonomi di Indonesia, dalam hal ini baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Keduanya harus dijalankan secara bersamaan dalam koordinasi yang sinergis, dalam arti kata bahwa arah implementasi dari satu kebijakan (misalnya, moneter) tidak berbenturan dengan kebijakan yang lainnya (misalnya, fiskal),

sehingga manfaat/tujuan yang diinginkan lebih besar peluangnya untuk tercapai. Selain itu, rumusan bauran kebijakan makro ekonomi, dalam hal ini, bauran kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat dirumuskan dengan begitu saja (menyederhanakan kompleksitas masalah yang dihadapi), namun harus melihat terlebih dahulu kondisi perekonomian yang sedang dihadapi Indonesia, sehingga baru dapat ditentukan rumusan kebijakan secara lebih tepat. Tabel 1 memperlihatkan beberapa petikan jawaban dari beberapa narasumber terpilih yang kompeten dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

Dari data primer yang telah dikumpulkan, khususnya pendapat dari beberapa informan/narasumber yang terdiri dari ahli/pakar maupun mantan birokrat, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami, di antaranya:

1. Bahwa pertumbuhan PDB yang tinggi dapat lebih dicapai/direalisasikan apabila pemerintah dapat merumuskan kebijakan makro ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun moneter secara tepat. Namun, sebelum itu, pemerintah lebih dulu harus memahami permasalahan inti yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Identifikasi masalah sangat diutamakan karena akan memberikan arah yang jelas atas rencana kebijakan, strategi dan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Pemerintah harus memahami profil dan postur PDB Indonesia, sehingga dapat diketahui dengan jelas komponen-komponen apa saja sebagai komponen pembentuk PDB Indonesia dan variabel-variabel makro ekonomi apa saja yang mempengaruhinya. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan strategi kebijakan makro ekonomi yang tepat dan cocok dengan kondisi/profil PDB Indonesia. Lebih lanjut, langkah konkrit dari strategi kebijakan makro ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter tersebut harus diarahkan sasarannya pada variabel-variabel yang mempengaruhi komponen pembentuk PDB, khususnya komponen dominan yang membentuk PDB tersebut.
3. Harus ada sinergi di antara kebijakan makro ekonomi yang terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dimana kebijakan yang satu dapat mendukung kebijakan yang lain dan sebaliknya, sehingga instrumen dari masing-masing kebijakan tersebut dapat berdampak secara efektif terhadap target pembangunan.

4. Hasil dari pertumbuhan PDB yang signifikan/optimal memungkinkan pemerintah untuk memiliki ruang fiskal/APBN yang lebih besar, karena meningkatnya porsi penerimaan negara/pendapatan pemerintah.
5. Pertumbuhan anggaran pertahanan hanya dapat dimungkinkan apabila kinerja perekonomian nasional, yang tercermin melalui pertumbuhan PDB, dapat menghasilkan porsi pertumbuhan hasil-hasil pembangunan yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Potensi Dampak Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter terhadap Pertumbuhan PDB

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan rumusan kebijakan makro ekonomi yang tepat yang mencakup kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Masing-masing kebijakan akan saling melengkapi dengan kebijakan makro ekonomi lainnya (moneter). Pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh variabel belanja pemerintah, pajak, Indeks Harga Konsumen (IHK), kurs dan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).¹³ Variabel belanja pemerintah dan pajak secara dominan masuk dalam indikator/variabel komponen dari kebijakan fiskal sedangkan variabel IHK yang merefleksikan tingkat inflasi, variabel kurs dan variabel tingkat bunga SBI masuk dalam komponen kebijakan moneter. Kontribusi dari kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan PDB dengan variabel *government spending* (G) dan variabel ekspor terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB sementara Kebijakan moneter dengan variabel JUB dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB.¹⁴

Hal ini didukung dengan temuan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui kebijakan fiskal defisit anggaran (ekspansif) yang dibiayai dari utang luar negeri, namun hal ini akan bersifat *inflationary*.¹⁵ Di sisi lain, ada temuan lain yang menyatakan bahwa baik kebijakan fiskal ekspansif maupun kontraktif, keduanya tidak serta merta

¹³ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, "Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia terhadap Variabel Ekonomi Makro di Indonesia", Tesis Sekolah Pascasarjana, (Medan: Universitas Sumatera Utara (USU), 2010).

¹⁴ Ada Tua Pardamean, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia, Tesis, (Medan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, 2013).

¹⁵ Teguh Pamuji T.N.H, "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (Tahun 1993-2007), Tesis Magister IESP, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan fiskal pemerintah cenderung *pro-cyclical* (mengikuti siklus ekonomi).¹⁶

Dengan demikian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memiliki kontribusi kepada pertumbuhan dan pembentukan PDB karena masing-masing kebijakan berperan penting dalam mengendalikan variabel-variabel makro ekonomi berbeda, yang tersebar baik dalam instrumen kebijakan fiskal maupun instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni kebijakan fiskal ekspansif (longgar) dan kebijakan fiskal kontraktif (ketat). Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan menempuh strategi defisit anggaran dimana besarnya nilai pengeluaran atau total nilai belanja pemerintah akan lebih besar dari nilai pendapatan pemerintah. Hal ini dimaksudkan supaya pemerintah dapat melakukan intervensi dengan cara mempengaruhi sisi permintaan barang dan jasa secara agregat.

Berkaitan dengan sektor pertahanan, kombinasi kebijakan moneter yang cenderung longgar yang disandingkan dengan kebijakan fiskal pemerintah yang cenderung ekspansif diharapkan memiliki potensi dampak positif terhadap besarnya anggaran pertahanan sebagai akibat dari terciptanya pertumbuhan PDB yang optimal. Pertumbuhan PDB yang optimal secara umum akan memperbaiki kondisi keuangan negara dan memperbesar ruang fiskal/APBN pemerintah. Pada satu sisi bauran kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai stimulus/pendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dapat berpotensi pula menambah besaran angka belanja pemerintah pada sektor pertahanan karena bertambahnya kapasitas ruang fiskal pemerintah. Namun, hal lain yang harus diperhatikan dan diwaspadai oleh pemerintah adalah distribusi/alokasi anggaran yang tepat pada sektor-sektor yang produktif, yang dapat memberi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat ekonomi lainnya seperti mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

¹⁶ Muhammad AfdiNizar, "Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia, 2000-2009", Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), (Depok : Universitas Indonesia,2010).

Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter dan Pengaruhnya terhadap APBN dan Anggaran Pertahanan

Setelah menetapkan pilihan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah menciptakan adanya sinergi (keselarasan) antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dipilih. Adapun yang menjadi aktor dari kebijakan fiskal adalah BKF dan aktor dari kebijakan moneter adalah BI. Untuk dapat menciptakan kebijakan fiskal dan moneter yang selaras maka diperlukan koordinasi kebijakan di antara BKF dan BI agar kedua-duanya dapat berintegrasi dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana temuan dari Angandrowa Gulo menyebutkan bahwa baik aspek fiskal maupun moneter, kedua-duanya secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB. Lebih lanjut pertumbuhan tersebut terdiri atas komponen peningkatan pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, dan penerimaan pajak.¹⁷ Menurut Chenny Septarita, kebijakan fiskal dan moneter, dalam jangka panjang, keduanya tidak saling bertentangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.¹⁸ Dalam jangka pendek, hanya kebijakan moneter yang terbukti memiliki hubungan keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan fiskal dalam jangka pendek terbukti tidak memiliki hubungan keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menandakan perlunya dibangun hubungan sinergis antara kebijakan fiskal yang dikelola oleh BKF, kebijakan moneter yang dikelola oleh BI dan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter oleh BKF dan BI sangat diperlukan dalam jangka pendek. Kebijakan fiskal dan moneter yang sama-sama ekspansif atau sama-sama kontraktif dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi/PDB.

Berdasarkan temuan Santoso dan Basuki¹⁹, terbukti bahwa kebijakan moneter memberikan pengaruh lebih besar dan efektif dalam meningkatkan PDB, sementara

¹⁷ Angandrowa Gulo, "Analisis Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *VISI*, Vol. 16, No.3, 2008, hlm.595 – 611.

¹⁸ Chenny Septarita, "Kebijakan Fiskal, Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Simposium Riset Ekonomi II, ISEI Jawa Timur, 2005.

¹⁹ Teguh Santoso, "Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2008.

kebijakan fiskal memberikan pengaruh yang lebih kecil dalam meningkatkan PDB. Kebijakan fiskal kurang berpengaruh terhadap peningkatan PDB, sebagai akibat dari adanya *crowding out effect* yang menegasikanseluruh dampak kebijakan fiskal. Hal ini berarti jika kebijakan yang dilakukan oleh BKF dan BI saling bertolak belakang, maka dalam jangka pendek kebijakan ini cenderung akan bertentangan dan efek kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kecil atau bahkan nol. Misalnya, jika pemerintah dengan BKF sebagai aktor kebijakan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan dan BI sebagai aktor kebijakan moneter menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk menekan efek kenaikan harga akibat peningkatan pengeluaran pemerintah, maka dalam jangka pendek, efek kenaikan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kecil bahkan nol atau terjadi fenomena yang dikenal sebagai *crowding out*.

Keberhasilan pemerintah (melalui aktor BKF dan BI) dalam melakukan koordinasi kebijakan makro ekonomi guna terciptanya keselarasan di antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tentu saja akan berpengaruh positif dan berkontribusi terhadap potensi pertumbuhan APBN sebagai akibat dari terciptanya pertumbuhan ekonomi/PDB yang lebih tinggi. Keselarasan kebijakan makro ekonomi juga akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan anggaran pertahanan karena pada dasarnya anggaran pertahanan dimungkinkan dapat ditingkatkan oleh pemerintah apabila terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang tercermin dari meningkatnya besaran anggaran (APBN) atau ruang fiskal pemerintah. Tabel 2. dan Tabel 3. menunjukkan diagram komposisi APBN tahun 2015 dan alokasi anggaran belanja per kementerian negara atau lembaga.

Tabel 1. Total Pengeluaran APBN 2015

Jenis Pengeluaran Belanja Negara	Nilai (Triliun Rupiah)	Persentase (%)
Belanja Kementerian Negara/Lembaga	647,3	32
Transfer Ke Daerah	638,0	31
Subsidi	414,7	19
Belanja Lainnya	178,4	9
Pembayaran Bunga Utang	152,0	8
Dana Desa	9,1	1
Jumlah	2.039,5	100

Sumber: Nota Keuangan Kementerian Keuangan 2015

Tabel 2. Distribusi/Alokasi Belanja per Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Negara/Lembaga	APBN-P (2014) (Triliun Rp.)	APBN 2015 (Triliun Rp.)
Kementerian Pertahanan	83,3	96,9
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	76,7	88,3
Kementerian Pekerjaan Umum	74,5	81,3
Kementerian Agama	51,6	56,4
POLRI	43,6	51,6
Kementerian Kesehatan	47,5	47,8
Kementerian Perhubungan	36,0	44,8
Kementerian Keuangan	18,2	18,7
Kementerian Pertanian	13,6	15,9
Kementerian ESDM	14,3	10,0
K/L Lainnya	143,1	135,4
Total	602,3	647,3

Sumber: Nota Keuangan Kementerian Keuangan 2015

Proporsi (Rasio) Ideal Pertumbuhan Anggaran Pertahanan terhadap PDB dan APBN

Gambaran awal tentang perbandingan alokasi anggaran atau pengeluaran belanja negara pada sektor pertahanan di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* diperlihatkan pada Tabel 4. Tabel 5. menunjukkan alokasi anggaran APBN berdasarkan fungsi pemerintahan di Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-Negara ASEAN Tahun 2013 (dalam USD)

No.	Negara	PDB (Milyar)	%	Anggaran Pertahanan (Milyar)
1	Singapura	297,941	3,3 %	9,823
2	Brunei Darusalam	16,111	2,6%	0,4188
3	Vietnam	171,391	2,2 %	3,770
4	Kamboja	15,429	1,6 %	2,830
5	Malaysia	312,435	1,5 %	4,686
6	Thailand	387,252	1,5 %	5,808
7	Filipina	272,017	1,3 %	3,536
8	INDONESIA	868,345	0,9 %	7,815
9	Laos	11,141	0,2 %	0,0222

Sumber: Inspektorat Pengadaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, 2015.

Tabel 4. Alokasi Anggaran APBN berdasarkan Fungsi Pemerintahan

No	Fungsi	APBN 2015	%
1	Pelayanan Umum	891.768,4	64,0
2	PERTAHANAN	96.823,9	7,0
3	Ketertiban dan Keamanan	46.137,9	3,3
4	Ekonomi	143.525,7	10,3
5	Lingkungan Hidup	10.679,5	0,8
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	20.465,8	1,5
7	Kesehatan	21.113,2	1,5
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.926,2	0,1
9	Agama	5.289,6	0,4
10	Pendidikan	146.392,8	10,5
11	Perlindungan Sosial	8.319,5	0,6
	TOTAL	1.392.442,3	100,0

Sumber: Nota Keuangan-APBN 2015, Kementerian Keuangan RI.

Tabel 5. Anggaran Kemhan dan TNI menurut Unit Organisasi 2015

Unit Organisasi	(Rp. Miliar)	(%)
Kemhan	23,759	24.51
Mabes TNI	7,196	7.42
TNI AD	39,987	41.25
TNI AL	14,462	14.92
TNI AU	11,531	11.90
Total	96,936	100.00

Sumber: Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, 2014

Tabel 6. menunjukkan alokasi anggaran pertahanan berdasarkan unit organisasi di Kemhan dan TNI. Dalam beberapa tahun terakhir ini, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat, namun banyak pihak mempertanyakan bahwa peningkatan anggaran tersebut memang terlihat dari besaran nominal angka yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya yang dilihat adalah peningkatan angka tersebut harus diukur berdasarkan persentase pertumbuhannya. Beberapa hal yang menjadi alasan pengukuran tersebut karena setiap tahun perekonomian Indonesia selalu mengalami inflasi dengan tingkat tertentu, sehingga terdapat perbedaan tingkat harga pada tahun sekarang

dengan tahun-tahun sebelumnya. Alasan kedua adalah faktor nilai tukar rupiah terhadap mata uang internasional, yakni dolar Amerika Serikat.

Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa dari tahun ke tahun, nilai rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, hal ini akan berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran untuk belanja modal yang khususnya berkaitan dengan alutsista yang harus dibeli dari luar negeri dan dibayar dalam *United States Dollar* (USD). Dengan kecenderungan pelemahan nilai tukar tersebut, secara otomatis berarti dibutuhkan jumlah rupiah yang lebih banyak untuk membayar pembelian dalam USD. Pada kenyataannya, anggaran pertahanan RI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih sebatas dilihat dari besaran jumlah anggaran nominal dari tahun-tahun sebelumnya, belum dihitung secara aktual, berapa sebenarnya pertumbuhannya riilnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan RI tahun 2014,²⁰ persentase anggaran pertahanan RI tahun 2010-2014 masih berikisar dalam rentang 0,81%-0,91% dari total nilai PDB Indonesia, dengan rata-rata dalam lima tahun tersebut 0,85% dari PDB. Berikut adalah perhitungan matematis yang menunjukkan estimasi kalkulasi dari perhitungan akselerasi anggaran pertahanan sehingga dapat diketahui berapa proporsi (rasio) ideal pertumbuhan anggaran pertahanan tiap tahunnya, melalui tiga tahapan perhitungan, yakni:

1. Memprediksi *future value* dari besaran nilai PDB pada tahun yang diestimasi. Sebagai contoh: PDB yang terestimasi adalah pada 2019, maka nilai estimasinya adalah :

$$\begin{aligned} \text{PDB (2019) est} &= \text{PDB(2015)} \times (1+\Delta y)^4 = 10.000 \times (1,05)^4 \\ &= 10.000 \times 1,2155 = 12.155 \text{ Triliun.} \end{aligned}$$

Δy = asumsi pertumbuhan PDB rata-rata = 5% per tahun.

2. Memprediksi besaran nilai riil anggaran pertahanan pada tahun tersebut berdasarkan rasio yang sudah ditargetkan untuk dicapai. Misalnya: rasio anggaran pertahanan yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebesar 1,5% dari PDB, maka

²⁰ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 670.

dapat dihitung besaran prediksi capaian anggaran pertahanan pada tahun tersebut:

Rasio Garhan (2019) *Expected* = 1,5% dari PDB (*MEFtargeted*)

Nominal Garhan (2019) *est* = 1,5% X 12.155T = 182,33 Triliun.

Dengan menggunakan tahun anggaran 2015 sebagai tahun dasar, dan besarnya anggaran pada tahun tersebut adalah 96 Triliun.

3. Menghitung nilai (faktor) pengali yang harus dicapai sehingga rasio ideal yang ditargetkan dapat dicapai. Dari nilai factor pengali ini, dapat dicari nilai rata-rata pertumbuhan anggaran pertahanan yang akan menjadi koefisien akselerasi tiap tahunnya sehingga target anggaran pertahanan yang sesuai dengan rasio padatahun yang ditargetkan dapat tercapai.

Nilai (faktor) Pengali = $182,33T : 96T = 1,8993x$ (kali) maka nilai rata-rata tingkat pertumbuhan garhan adalah:

$$182,33 = 96 \times (1+r)^4$$

$$1,8993 = (1+r)^4$$

$$r \text{ (avg)} = 0,17 = 17\% \text{ p.a. (rata-rata per tahun)}$$

Dari simulasi perhitungan di atas maka dapat diketahui apabila tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia diasumsikan mencapai rata-rata 5% per tahun, sementara anggaran pertahanan dapat dinaikkan sebesar 17% dari anggaran tahun sebelumnya secara konsisten dalam waktu empat tahun maka rasio anggaran pertahanan 1,5% dari PDB dapat tercapai pada akhir tahun 2019. Tabel 11 menunjukkan simulasi hasil perhitungan alokasi anggaran pertahanan yang harus dicapai secara konsisten tiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2019 agar ekspektasi target rasio 1,5% anggaran pertahanan terhadap PDB dapat direalisasikan pada tahun akhir 2019. Perhitungan tersebut juga menunjukkan bahwa angka persentase pertumbuhan alokasi anggaran pertahanan per PDB harus lebih besar sekitar kurang lebih 3 kali dari angka persentase pertumbuhan PDB itu sendiri. Hal ini berarti pula harus terjadi konsistensi/keberlanjutan kondisi dimana besaran persentase pertumbuhan anggaran pertahanan lebih besar dari persentase pertumbuhan tahun sebelumnya.

Tabel 6. Simulasi Matematis Capaian Anggaran Pertahanan berdasarkan Rasio 1,5 % PDB

Kategori	2015	2016	2017	2018	2019
PDB (pertumbuhan)	5%	5%	5%	5%	5%
PDB terestimasi (Triliun)	10,000	10,500	11,025	11,576	12,155
Target Garhan (1,5%PDB) (Triliun)	96.00	112.69	132.29	155.30	182.30
Asumsi Rt2 pertumbuhan anggaran pertahanan (10%)	96.00	105.60	116.16	127.78	140.55
Selisih/Kekurangan Garhan	0.00	7.09	16.13	27.52	41.75
Rasio Capaian anggaran pertahanan terhadap PDB	0.96%	1.01%	1.05%	1.10%	1.16%
AsumsiRt2 pertumbuhan anggaran pertahanan (15%)	96.00	110.40	126.96	146.00	167.90
Selisih/Kekurangan anggaran pertahanan	0.00	2.29	5.33	9.29	14.40
Rasio Capaian anggaran pertahanan terhadap PDB	0.96%	1.05%	1.15%	1.26%	1.38%

Sumber: diolah oleh Penulis

Catatan: Simulasi di atas dapat dimodifikasi sedemikian rupa berdasarkan asumsi indicator variatif yang digunakan, misalnya:

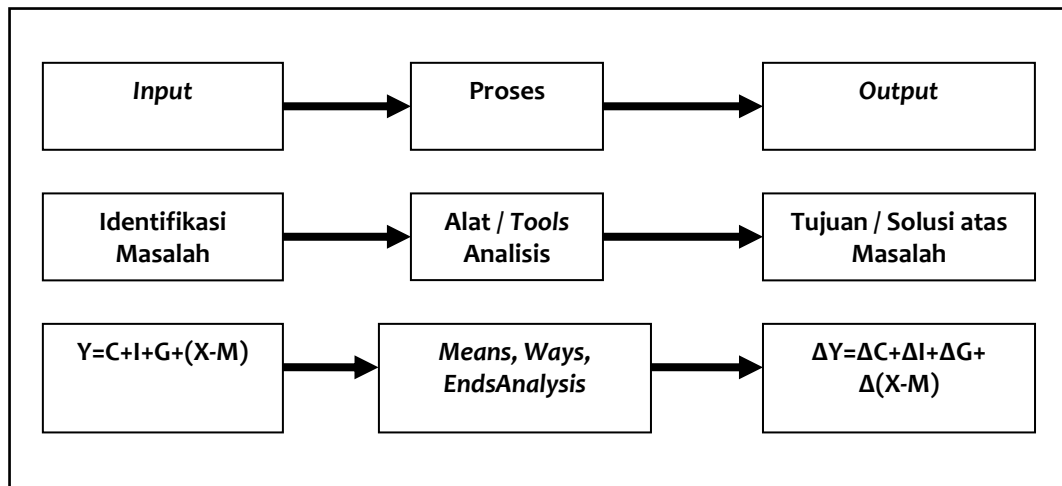
1. asumsi realistis rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya, apakah 5% atau 5,5% per tahun.
2. tenor atau jangka waktu akselerasi capaian MEF apakah 3 tahun atau 4 tahun (2018 atau 2019).
3. besaran realistis persentase target capaian rasio anggaran pertahanan, apakah 1,5% atau 2% dari PDB.

Analisis dan Diskusi

Alur pikir sederhana dalam penyelesaian masalah disampaikan pada Gambar 1 dari diagram blok tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah adanya pertumbuhan ekonomi/pertumbuhan PDB yang relatif tinggi dengan memperhatikan masalah-masalah riil yang dihadapi dalam perekonomian nasional sekarang ini. Dari persamaan $Y=C+I+G+(X-M)$ sebagai definisi output total nasional atau PDB, maka secara seksama dapat diartikan bahwa totalitas kapasitas produksi nasional (PDB) dibentuk oleh

komponen-komponen yakni konsumsi rumah tangga (*household consumption*) (C), investasi/pembentukan modal tetap bruto dalam negeri (I), belanja pemerintah (G) dan net ekspor/nilai bersih ekspor (X-M).

Gambar 1. Alur Pikir Analisis Masalah



Sumber: adaptasi penulis

Tabel 7. Pertumbuhan PDB menurut Komposisi Komponen Pembentuknya

Jenis Pengeluaran/Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015 *
Private Consumption	4,26	5,05	5,49	5,38	5,14	5,01
Non-Profit Private Consumption	-3,7	5,54	6,68	8,18	12,43	-8,25
General Government Cons	3,99	5,52	4,53	6,93	1,98	2,21
Gross DomesticFixed Capital Formation	6,69	8,86	9,13	5,28	4,12	4,36
Exportson goods and services	15,28	14,77	1,61	4,17	1,02	-0,53
LessImports of Goods and Sevices	16,58	15,03	8	1,86	2,19	-2,20
GDP	6,38	6,17	6,03	5,58	5,02	4,71

* Kuartal pertama (Januari-Maret)

Sumber: BPS, 2014.

Tabel 8. Komposisi Empat Komponen Pembentuk PDB

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga (C)	Konsumsi Pemerintah (G)	Ekspor-Impor (X)-(M)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (I)
2001	67,0%	7,4%	8,5%	20,9%
2002	70,6%	8,2%	6,8%	20,2%
2003	67,1%	8,0%	7,6&	18,9%
2004	67,4%	8,4%	4,7%	21,7%

2005	64,1%	8,1%	4,3%	23,6%
2006	62,7%	8,6%	5,4%	24,1%
2007	63,5%	8,3%	4,0%	24,9%
2008	60,6%	8,4%	1,1%	27,7%
2009	58,7%	9,6%	2,8%	31,1%
2010	56,7%	9,1%	1,6%	32,2%

Sumber: BPS, 2011

Pertama, harus dipahami terlebih dahulu tentang profil pertumbuhan PDB di Indonesia, variabel apa saja yang sangat dominan sebagai variabel utama pembentuk PDB Indonesia. Menurut data dari *Boston Consulting Group* (BCG), komposisi variabel pembentuk PDB Indonesia pada 2013 adalah konsumsi rumah tangga, C=58%, kegiatan investasi, I=27%, belanja pemerintah, G=8%, dan net ekspor (X-M)=7%.

Kedua, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), BI maupun Kemkeu RI, variabel utama pembentuk PDB Indonesia adalah variabel C (konsumsi rumah tangga) dan variabel I (investasi). Variabel konsumsi rumah tangga itu sendiri didominasi oleh kegiatan konsumsi oleh kelompok/golongan ekonomi kelas menengah dan ekonomi kelas bawah. Dalam hal besaran konsumsi rumah tangga, terjadi fenomena menarik di Indonesia yakni adanya pertumbuhan yang pesat dari jumlah penduduk (populasi) kelas ekonomi menengah (*middle income class*). Pertumbuhan ini seiring dengan semakin maraknya kegiatan ekonomi sektor riil yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat seperti wirausaha dan mulai tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif. Sementara, komponen I dibentuk oleh investasi domestik dan asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI), dimana investasi domestik terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini pemerintah dan badan usaha milik swasta.

Ketiga, apabila pemerintah hendak meningkatkan pertumbuhan nilai PDB (Y), maka dua faktor utama di atas tersebutlah (konsumsi rumah tangga dan investasi), yang terutama kali harus diatasi dan dikelola dengan baik karena pertumbuhan pada komponen C dan I akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan nilai Y.

Keempat, langkah yang dapat ditempuh adalah merumuskan kebijakan makro ekonomi, dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter dengan masing-masing instrumen kebijakannya yang diarahkan untuk mempengaruhi variabel C dan I. Strategi sederhananya adalah arahkan instrumen kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan moneter untuk memberikan stimulus positif, terhadap pertumbuhan C dan I melalui intervensi kendali/kontrol atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel C dan variabel I.

Kelima, implementasi kebijakan fiskal dan moneter melalui instrumen-instrumennya dilaksanakan secara sinergis, koordinatif dan konsisten. Apabila implementasi ini dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh dan disiplin maka potensi pertumbuhan Y akan diperoleh dari pertumbuhan variabel C dan I.

Pengaruh Pertumbuhan PDB terhadap Potensi Pertumbuhan APBN dan Anggaran Pertahanan

Apabila rancangan kebijakan makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter, dapat dirumuskan dengan tepat dan diimplementasikan dengan konsisten, maka sangat dimungkinkan pertumbuhan PDB yang diharapkan sangat potensial terjadi. Pertumbuhan PDB, pada gilirannya akan memberikan kesempatan pemerintah untuk memiliki ruang fiskal yang lebih besar atau pemerintah dapat memperbesar volume APBN karena adanya peningkatan pendapatan pemerintah baik dari sisi pajak maupun non-pajak.

Peningkatan volume APBN tersebut, berarti pula semakin besarnya pos pengeluaran atau belanja yang dapat dialokasikan pemerintah pada tahun fiskal berikutnya. Potensi pertumbuhan anggaran sector pertahanan akan sangat dimungkinkan terjadi apabila pemerintah memiliki uang/dana yang lebih besar dari tahun fiskal sebelumnya, yang telah dihasilkan dari hasil pembangunan atau pertumbuhan PDB tahun sebelumnya. Dengan demikian, ekspektasi pertumbuhan anggaran sector pertahanan akan sangat mungkin terjadi atau dapat direalisasikan tanpa harus mengganggu/mengorbankan porsi penerimaan anggaran belanja untuk sektor-sektor pembangunan lainnya.

Rumusan Kebijakan

Dari analisis dan pembahasan di atas, kebijakan strategis yang dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan upaya pertumbuhan PDB yang tinggi, adalah:

1. menjaga dan mempertahankan agar tingkat konsumsi rumah tangga (C) tidak merosot, sebaliknya mengarahkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter agar dapat memperbesar akumulasi porsi agregat konsumsi rumah tangga (C) sebagai komponen terbesar pembentuk PDB Indonesia. Kebijakan fiskal dan moneter dapat diarahkan untuk menjaga agar masyarakat golongan ekonomi menengah dan khususnya ekonomi kelas bawah, tetap memiliki daya beli yang baik bahkan dapat ditingkatkan kemampuannya. Selain itu, juga kebijakan yang berkaitan dengan upaya menghidupkan sektor riil sehingga akan menciptakan kemampuan daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah. Kebijakan lainnya, misalnya mendorong hidupnya kegiatan sektor riil melalui kegiatan wirausaha sehingga selain menghidupkan ekonomi kelas bawah juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.
2. Menghidupkan sektor riil dan menggalakkan kegiatan wirausaha. Kebijakan pemerintah yang tepat adalah mendorong peningkatan jumlah populasi penduduk kelas ekonomi menengah melalui kegiatan wirausaha dan sektor riil lainnya, sehingga jumlah masyarakat golongan ekonomi kelas menengah dapat terus bertumbuh yang secara kumulatif akan memperbesar pembentukan PDB itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang dapat menciptakan kondisi membaiknya iklim usaha pada sektor riil dan wirausaha akan mendorong golongan ekonomi kelas di bawahnya dapat bangkit dan masuk ke dalam kelompok kelas ekonomi menengah. Dari sisi instrumen kebijakan moneter, pemerintah dapat menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang relatif rendah bagi kegiatan sektor riil dan wirausaha sehingga biaya modal (*cost of fund*) tidak menjadi mahal dan mendorong masyarakat mau berwirausaha.
3. Dilihat dari sisi investasi, sudah seharusnya kebijakan makro ekonomi pemerintah diarahkan supaya tingkat investasi di Indonesia dapat meningkat, khususnya dari kegiatan FDI. Upaya konkrit dari kebijakan terkait FDI adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif/menarik bagi investor asing, misalnya melalui

kebijakan perpajakan (*incentif* pajak) yang tidak memberatkan dan kebijakan perizinan usaha yang semakin mudah dan cepat.

4. Dari sisi fiskal eksternal (perdagangan internasional), pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal dan moneter untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran (*balance of payment*) Indonesia dengan cara mendorong peningkatan ekspor dan mengurangi impor. Langkah konkritnya adalah dengan mendorong peningkatan volume ekspor melalui ekspor atas produk unggulan dalam negeri dan di sisi lain mengurangi ketergantungan impor dengan menciptakan produk substitusi di dalam negeri.

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis pengambilan kebijakan *Means-Ways-Ends*, disimpulkan bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dirumuskan secara tepat dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan PDB yang optimal. Rumusan kebijakan secara tepat yang dimaksud adalah rumusan bauran kebijakan yang sinergis/selaras, dalam arti tidak saling bertentangan/menegaskan satu sama lain sehingga masing-masing kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter dapat berdampak secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian, bauran kebijakan makro ekonomi yang dinilai tepat dan sinergis adalah kebijakan fiskal ekspansif (melalui defisit anggaran) yang dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang longgar (ekspansif) pula.
2. Rumusan bauran kebijakan fiskal dan moneter secara tepat dalam pengelolaan perekonomian nasional dapat berdampak positif pada meningkatnya kekuatan anggaran pertahanan. Hal ini dikarenakan kinerja pertumbuhan ekonomi (PDB) yang optimal sebagai hasil dari rumusan kebijakan makro ekonomi yang tepat memungkinkan bagi pemerintah untuk memiliki ruang fiskal (APBN) yang lebih besar sehingga penambahan/ pertumbuhan anggaran sektor pertahanan sangat mungkin dilakukan tanpa harus mengorbankan anggaran pembangunan sektor lainnya. Seiring dengan pertumbuhan anggaran pertahanan maka target-target pembangunan kekuatan pertahanan sangat mungkin direalisasikan dan pada akhirnya kondisi kekuatan pertahanan negara akan menjadi semakin baik.

3. Berdasarkan simulasi perhitungan matematis maka diperoleh kesimpulan bahwa rasio ideal pertumbuhan anggaran pertahanan tiap tahunnya harus mencapai sekitar tiga kali dari rasio pertumbuhan PDB itu sendiri dan penambahan tersebut harus dilakukan secara konsisten hingga 2019. Apabila asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan PDB yang realistis pada kisaran 5,0-5,5% per tahun maka anggaran pertahanan harus tumbuh sekitar 15-17% per tahun secara konsisten hingga tahun 2019. Dengan demikian, rencana dan target percepatan pencapaian MEF 2024 sebelum tahun 2024 dapat terealisasi.
4. Hasil simulasi perhitungan matematis di atas dapat menjadi model baru dalam penghitungan anggaran pertahanan yang berbasis pada pertumbuhan PDB dan dapat dijadikan sebagai model alternatif bagi Kementerian Pertahanan.

Rekomendasi

1. Penambahan kapasitas belanja pemerintah (G) melalui kebijakan fiskal ekspansif (defisit anggaran) akan memiliki dampak positif berupa *multiplier effect* dan berpengaruh positif terhadap total *output* nasional. Untuk itu, dibutuhkan adanya peran pemerintah melalui aktor kebijakan BKF dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dalam hal mengelola tambahan belanja pemerintah tersebut dengan cara menentukan program-program pembangunan yang bersifat produktif sehingga dapat menciptakan nilai tambah maupun manfaat ekonomis lainnya. Penambahan ruang fiskal pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif dapat berdampak pada pertumbuhan anggaran pertahanan seiring dengan meningkatnya besaran nilai APBN.
2. Di satu sisi, kebijakan fiskal sangat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan analisis makroekonomi secara matang, rasional dan hati-hati tetapi di sisi lain kebijakan fiskal adalah produk kebijakan dan hasil dari proses politik yang terjadi antara eksekutif (BKF/Kementerian Keuangan) dan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, diperlukan adanya sinergi antara aktor BKF/Kementerian Keuangan sebagai perumus kebijakan dengan aktor DPR sebagai lembaga yang menyetujui rumusan kebijakan tersebut sehingga kebijakan fiskal tersebut dapat segera direalisasikan.

3. Hal lain yang tidak boleh diremehkan terkait dengan implementasi anggaran pertahanan adalah adanya penguatan fungsi pengawasan melalui aktor Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemhan. Irjen Kemhan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dalam proses penyerapan, implementasi program dan kegiatan yang terkait dengan dana anggaran pertahanan sehingga kebijakan fiskal yang telah mengakomodasi adanya penambahan anggaran pertahanan tidak akan sia-sia.
4. Berdasarkan data empiris makro ekonomi Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam pola pertumbuhan ekonomi makro Indonesia, ada dua komponen utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan yakni komponen konsumsi masyarakat (C) secara agregat yang masih tinggi, yang disokong dari pertumbuhan jumlah populasi kelas ekonomi menengah dan komponen pertumbuhan nilai kapitalisasi FDI (I). Dengan demikian untuk menciptakan porsi pertumbuhan ekonomi/PDB yang lebih besar, maka diperlukan peran aktor BI dan BKF dalam merumuskan bauran kebijakan fiskal maupun moneter secara tepat yang diarahkan untuk memaksimalkan pertumbuhan dua komponen tersebut. Sementara itu, untuk meningkatkan komponen Investasi (I), diperlukan pula peran aktor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan cara meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Boediono. 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Dernburg, Thomas F. dan Karyaman M. 1994. *Makro-Ekonomi: Konsep, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Dorn Busch, R. 1997. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Frederic S. Mishkin. 2009. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartley, K. and T. Sandler. 1995 . *Handbook of Defense Economics*. Vol.1. England: Elsevier Science B.V.
- Julaihah, Umi. 2012. *Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Variabel Makro Ekonomi di Indonesia*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Mankiw, N. Gregory. 2008. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Ke-6. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Manurung, Prathama. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi*.
- Mulyana, Dedy. 2003. *Metologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
- Nanga Muana. 2001. *Makro Ekonomi Teori, Masalah Dan Kebijakan*, Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neuman. W. L. 1997. *Sosial Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Third Edition). USA: Boston.
- Rahardja Prathama dan Manurung Mandala. 2006. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siregar, Sofyan. 2011. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyuni, Sari. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warjiyo Perry dan Solikin. 2003. *Kebijakan Moneter di Indonesia*. PPSK: Bank Indonesia.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Almizan, Ulfa. 2004. "Studi Analisis Kebijakan Fiskal dan Struktur Pembiayaan Jangka Menengah di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Vol. 40. No. 20. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Rachmadi, Arif Lukman. 2013. "Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus Tahun 2001-2011)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, FEB. Malang: Universitas Brawijaya.
- Dona, Elva, Hasdi Aimon, dan Zul Azhar. 2011. "Analisis Ekonomi Sektor Riil Dan Sektor Moneter di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1 No. 2.
- Grossman, P. 1988. *Government and Economic Growth, A Non Linier Relationship*. PublicChoice. *Jurnal Public Choice*. Vol. 56. No. 2.
- Gulo, Angandrowa. 2008. "Analisis Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *VISI*. 16. 3.

- Hermawan, Wawan. 2006. "Pengujian Kausalitas Antara Tingkat Bunga Dan Neraca Pembayaran di Indonesia Tahun 1991-2001". *Bina Ekonomi*. Vol.10 No. 2.
- Muharman, Berto. 2013. "Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB Dan Inflasi di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1. No. 1. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Santoso, Teguh. 2008. "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming". *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol.5. No. 2.
- Seprillina, Linda. 2013. "Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1. No. 1. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Septarita, Chenny. 2005. "Kebijakan Fiskal, Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Simposium Riset Ekonomi II. ISEI Jawa Timur.
- Sujai, Mahpud. 2011. "Dampak Kebijakan Fiskal Dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas". *Analisis Kebijakan*. Vol. 9. No. 4.
- Surjaningsih, Ndari, G. A. Diah Utari, dan Budi Trisnanto. 2012. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.

Tesis

- Bustamam, Narwati. 2004. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Propinsi Riau (1976 -2000)". Tesis. USU, Medan.
- Handayani, Rita. 2010. Analisis Inflasi dan Variabel Makro Ekonomi di Indonesia, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
- Manurung, B. Rikardo. 2002. "Twin Defisit di Indonesia". Tesis Magister Ekonomi Pembangunan. Universitas Sumatera Utara (USU). Medan.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2010. "Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia, 2000-2009". Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Universitas Indonesia.
- Pardamean, Ada Tua. 2013. "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia". Tesis. Medan: Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Pardede, Appan. 2010. "Analisis Respon Variabel Ekonomi Makro terhadap Inflation Targetting Framework di Indonesia. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
- Pamuji, Teguh T.N.H. 2008. "Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (Tahun 1993-2007)". Tesis Magister IESP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ratnawati, Nirdukita dan Rulli Rizki. 2006. "Analisis Pengaruh Variabel Indikator Ekonomi Makro Terhadap Perekonomian Indonesia: Pendekatan Pasar Barang Dan Pasar Uang (Periode 1996-2005)". Tesis. USU, Medan.
- Rojeston, Benny dan Marnaek Nainggolan. 2010. "Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia Terhadap Variabel Ekonomi Makro di Indonesia". Tesis Sekolah Pascasarjana. Medan: Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Website

Antariksa, Yani, “Kebijakan Penyelesaian Minimum Essential Forces (MEF), dalam <http://www.artileri.org/>, 3 Desember 2013, diunduh pada 26 November 2015.

Bappenas, “Evaluasi/Tinjauan Bappenas terhadap RPJMN 2015-2019 Bab 9 Pertahanan dan Keamanan” dalam http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9549, diunduh pada 26 November 2015.

Kemhan, “Kemhan optimis MEF tercapai pada 2019” dalam <http://www.indonesia.go.id/12117-kemhan-optimis-mef-tercapai-pada-2019>, diunduh pada 26 November 2015.

Kemhan RI, 2012, “Presiden akan meningkatkan anggaran pertahanan 20%”, dalam <http://www/indonesia.go.id>, diunduh pada 26 November 2015.